



Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Financial Report Analysis as a Basis for Financial Performance Assessment in the Regional Government of Central Sulawesi Province

Sintha Agresia^{1*}, Margretha E.J. Wagey², Abdul Rahman Taher³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido, AZLAM Panca Bhakti Palu

*Corresponding Author: E-mail: sagresiatopo@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 May, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan

Keywords:

Financial Reports, Financial Performance

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7493](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7493)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menganalisis data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian daerah dan rasio efektifitas yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kriteria efisien dan efektif.

ABSTRACT

This study aims to determine how the analysis of financial reports as a basis for assessing the financial performance of the regional government of Central Sulawesi province. The type of data used in this study is descriptive and analyzes data by means of observation, interviews, and documentation. This study was conducted at the financial management agency and regional assets of Central Sulawesi province. This study uses the regional financial efficiency ratio, the regional independence ratio, and the effectiveness ratio which are selected based on the considerations of the researcher. The results of this study explain that the financial performance of the Central Sulawesi regional government shows efficient and effective criteria.

PENDAHULUAN

Banyak sekali kepentingan yang saling berhubungan dan bersaing di era modern karena banyaknya inovasi dan kemajuan yang dibawa oleh teknologi yang lebih canggih dan perekonomian yang semakin terbuka antar negara. Karena sektor swasta tidak dapat mengelola setiap aspek perekonomian, peran pemerintah dalam mengatur sistem menjadi semakin penting. Tanggung jawab utama pemerintah sebagai entitas sektor publik adalah menunjukkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah merupakan tanda seberapa baik perekonomian suatu negara. Pemerintah yang amanah dan bertanggung jawab kepada rakyatnya adalah pemerintah yang akuntabel. Pertanggungjawaban ini memerlukan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyampaian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai.

Kinerja adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mewujudkan misi, visi, tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategisnya. Sementara itu, kinerja keuangan dan non-keuangan harus diukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perincian yang spesifik dan mendalam mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor dalam suatu periode pelaporan tertentu.

Menganalisis laporan keuangan memerlukan evaluasi situasi keuangan masa lalu, saat ini, dan masa depan dan sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang posisi keuangan. Tujuan nya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Rasio keuangan adalah seperangkat metrik umum yang digunakan dalam analisis keuangan, yang diperlukan untuk menganalisis data keuangan. Analisis rasio berguna dalam mengungkap rincian kesehatan keuangan pemerintah daerah terkait. Namun analisis rasio juga memberikan informasi yang terbatas, oleh karena itu analisis rasio harus digunakan secara hati-hati ketika mempertimbangkan permasalahan pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Laporan Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data. dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau interfew, observasi, dan dokumnetasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dari data yang diperoleh, dilakukan analisis data agar dapat diketahui hasilnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan penelitian ini mengunnakan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
2. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat}} \times 100\%$
3. Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Hasil Analisis Data

Data laporan keuangan yang diambil peneliti adalah data laporan keuangan pada tahun 2020-2022. Untuk mengetahui laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan dalam kurun waktu

tiga tahun, peneliti menggunakan rasio kinerja keuangan yang meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah serta rasio efektivitas.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%, dikategorikan efisien berimbang apabila rasio yang dicapai 100% dan dikategorikan tidak efisien apabila rasio yang dicapai lebih dari 100%.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Perhitungan Realisasi Belanja Dan Pendapatan Daerah Menggunakan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Presentase	Kriteria
2020	3.810.416.446.556,90	4.193.329.057.130,07	90,86%	Efisien
2021	4.339.507.807.931,43	4.695.680.664.185,80	92,41%	Efisien
2022	4.825.333.666.427,41	4.895.740.491.702,45	98,56%	Efisien

Sumber Data: hasil olahan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian juga mengerah digambarkan ketergantungan daerah akan sumber dana luar, khususnya dari provinsi serta pemerintah pusat. Rasio kemandirian daerah yang semakin tinggi menandakan semakin rendah ketergantungan akan bantuan dari pihak luar (khususnya provinsi serta pemerintah pusat). Rasio kemandirian yang semakin tinggi menandakan partisipasi dari masyarakat yang semakin besar untuk membayarkan retribusi serta pajak selaku komponen inti dari PAD

$$\frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{BANTUAN PUSAT}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2020	1.054.606.448.582,08	3.006.594.138.193,87	35,07 %
2021	1.247.983.639.798,00	3.022.204.549.603,00	36,48 %
2022	1.561.939.035.510,00	3.136.463.381.169,00	44,60%

Sumber data : Hasil olahan

Rasio Efektivitas

Rasio ini mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan PAD yang ia rencanakan dibanding pada sasaran yang ditentukan berdasar pada potensi rill daerah.

Pemerintah daerah terbilang dapat melaksanakan tugas jika rasio yang diraih setidaknya yakni 1 ataupun 100%. Rasio efektivitas yang semakin tinggi menandakan semakin baiknya kemampuan daerah.

$$\frac{REALISASI PENERIMAAN PAD}{TARGET PAD} \times 100\%$$

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2020	1.122.670.398.589,07	1.054.606.448.582,08	1,64 %
2021	1.494.246.152.092,51.	1.247.983.639.798.,00	1,19%
2022	1.559.706.290.296,45	1.561.939.035.510,00	99,85%

Sumber Data : Hasil Olahan

KESIMPULAN

Pada tahun 2020 dan tahun 2022 kinerja keuangan pemerintah daerah Sulawesi Tengah ditinjau dari rasio efisiensi menunjukkan kriteria efisien sebesar 90,86% dan 98,56% dan pada tahun 2021 menunjukkan kriteria tidak efisien sebesar 92,41%.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dilihat dari rasio kemandirian daerah mengalami kenaikan sebesar 36,48% pada tahun 2021 dari tahun 2020 yaitu sebesar 35,07% dan pada tahun 2022 tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah lebih meningkat menjadi 44,60%.

Dilihat dari rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar dari 99,85% ditahun dan 1,64% ditahun 2020., yang mana membuat kriteria efektivitas mengalami penurunan menjadi “efektif” ditahun 2022 dan ditahun 2020-2021 menjadi kriteria “tidak efektif”

SARAN

Pemerintah daerah Sulawesi Tengah harus dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan dan mampu mengoptimalkan dan potensi pendapatannya yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2001
 Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga, 2010
 Mohammad Mahsun., Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE, 2012
 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 Helmi Herawati., Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. Jurnal Akuntansi Unihaz, Juni 2019, hal.16
 Dito Aditia Darma Nasution., Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 2018, hal. 149-162.
 Rati Pundissing., Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, April 2022.
 Freddy Samuel Kawatu., Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama, 2019.

- Dr. Anik Yuesti, SE.MM, dkk., Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Juni 2020.
- Oldison Santosa, dkk., Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2014.
- Ni Kadek Sriwati., Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Puskesmas Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Jurnal Ekomen, September 2016.
- Debora Lusiana Silalahi., dkk. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Tirta Lihou Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun. Jurnal Akuntansi, 2015.
- Neni Machrifah., dkk., Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman, 2016.
- T. Easterevribora Sihombing., Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Repository, Univeristas HKBP Nomensen, September 2018.